EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kemiskinan Pulau Jawa Periode 2013-2021

Dhea Cahya Nilam Triana Dewi
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah,
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Telp (0271)717417 Surakarta – 57102 Indonesia
e-mail: dheacahyanilamtrianad18@gmail.com

Artikel Info

Received :
27 June 2022
Revised :
30 June 2022
Accepted :
4 July 2022

Kata Kunci :
Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Upah Minimum Regional, Indeks Gini.

Keywords :
Poverty, Expenditure Government Education Sector, Health Sector Government Expenditures, Regional Minimum Wages, Gini Rasio

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, indeks gini dan upah minimum regional baik secara simultan maupun parsial di Pulau Jawa selama periode 2013-2021. Penelitin ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* dengan kurun waktu 2013-2021 di 6 provinsi di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakan adalah data panel dengan model estmasi terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan indeks gini dan upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa selama periode 2013-2021.

Analysis Of Factors For Poverty Island Java 2013-2021 Period

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government spending on the education sector, government spending on health, the Gini index and the regional minimum wage both simultaneously and partially in Java during the period 2013- 2021. This study uses secondary data in the form of time series data with the period 2013-2021 in 6 provinces on the island of Java. The analytical method used is panel data with the chosen estimation model is the Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the variables of government expenditure in the education sector and government expenditure in the health sector

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

had a significant effect on poverty, while the Gini index and the regional minimum wage had no effect on poverty in Java during the period 2013- 2021.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2015).

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan menjadi masalah multidimensional, sehingga upaya-upaya penurunan jumlah penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif, melalui berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan terpadu (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian dunia. Negara miskin masih dihadapkan dengan masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduknya sehingga masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga tercukupinya indikator kesehatan dan pendidikan. Indikator kesehatan dapat diukur dengan melihat jumlah anak yang meninggal dan tingkat gizi anak dalam keluarga. Indikator pendidikan diukur dengan melihat minimal 1 anggota rumah tangga telah menyelesaikan 5 tahun sekolah, dan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Apabila suatu rumah tangga tidak dapat memenuhi kondisi–kondisi minimal tersebut, berarti rumah tangga bersangkutan hidup dalam kemiskinan (Todaro & Smith, 2015).

Masalah kritis dalam pembangunan ekonomi adalah pemberantasan kemiskinan absolut. O leh karena itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mengurangi kemiskinan adalah tujuan yang selaras. Tingkat kemiskinan absolut adalah jumlah penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dengan garis kemiskinan yakni orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $ 1,25 sehari atau $ 2 per hari (Todaro & Smith, 2015). Pulau Jawa memiliki potensi kekuatan ekonomi di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam melimpah mulai dari pertanian, pertambangan, perairan, sumber daya manusia dan keahlian pengolahan akan menjadi faktor pendorong pembangunan di Pulau Jawa dan menciptakan kesejahteraan bukan hanya di kawasan ini, tetapi seluruh bangsa. Meskipun memiliki potensi kekuatan ekonomi, Pulau Jawa juga mengalami ketertinggalan pembangunan yang menjadi sumber pemicu masalah ketidakadilan dan penurunan kesejahteraan, daerah yang tertinggal, rendahnya aktivitas pasar ekonomi, rendahnya modal dan penurunan produktivitas. Permasalahan pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa menjadi penting dengan kondisi kemiskinan yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1 memperlihatkan presentase penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2013- 2021.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa presentase penduduk miskin di Pulau Jawa dari tahun 2017-2021 secara umum mengalami penurunan dari sisi jumlahnya, yang disebabkan karena semakin terdistribusi nya pendapatan di Pulau Jawa. Presentase penduduk

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

miskin di Pulau Jawa pada tahun 2020 sebesar 9.04 persen, hal tersebut menggambarkan adanya penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan karena kebijakan program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah pada 4 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2019-2020 berhasil mengalami penurunan yang cukup banyak namun, di beberapa provinsi masih cukup tinggi, seperti di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mencapai 11.84 persen, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 11.40 persen dan pada Provinsi DI Yogyakarta mengalami peningkatan penduduk miskin mencapai 12.80 persen pada tahun 2021. Peningkatan presentase penduduk miskin yang akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2017 -2021

Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Barat	8.71	7.45	6.91	7.88	8.40
Jawa Tengah	12.23	9.67	10.58	11.84	11.25
JawaTimur	11.77	10.98	10.37	11.09	11.40
DKI Jakarta	3.77	3.57	3.47	4.53	4.72
Banten	5.59	5.25	4.94	6.63	6.66
DI Yogyakarta	13.02	12.13	11.70	12.28	12.80
Rata-Rata	9.18	8.18	8.00	9.04	9.21

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah).

Bappenas (2018) menyampaikan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh sulitnya akses layanan dasar secara umum, kurangnya fasilitas kesehatan serta pendidikan masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi, pola pikir dengan mementingkan upacara adat dan mengorbankan kebutuhan pendidikan dan gizi yang berpengaruh terhadap sumber daya manusia, pola pikir yang tidak berkembang, mempengaruhi produktivitas masyarakat. Ditambah dengan faktor topografi wilayah yang menyebabkan wilayah tersebut terisolasi, sulitnya mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, hingga pelayanan dasar masyarakat dan kejadian bencana memperparah kondisi kemiskinan.

Permasalahan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa menjadi penting karena, presentase penduduk miskin di Pulau Jawa secara umum mengalami penurunan, namun dari tahun ke tahun masih memiliki angka yang relatif tinggi. Sehingga pengembangan ekonomi di Pulau Jawa harus lebih inklusif dengan memprioritaskan pengembangan ekonomi lokal dari sumber daya alam yang akan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengatasi penurunan jumlah penduduk miskin. Penelitian ini akan mengamati pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, upah minimum regional dan indeks gini terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

KAJIAN TEORI

Kemiskinan

Supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Saparudin, 2015). Menurut Collins (2020), "kemiskinan merupakan kurangnya kemampuan dari masyarakat dalam memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan dasarnya dan melakukan pilihan dalam menentukan standar hidupnya sehingga adanya kegagalan dalam mencapai kesejahteraan". Apabila terjadi peningkatan pendapatan tidak langsung meningkatkan kesejahteraan jika pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Teori Perspektif Kapitalis Marx menyatakan kemiskinan disebabkan oleh eksploitasi sosial dan pengecualian kelas tertentu. Teori ini berpendapat bahwa kemunculan eksploitasi sosial karena adanya pekerja dengan upah yang rendah bahkan pengecualian dari hak-hak tertentu seperti tunjangan kerja, kondisi pekerjaan memburuk dan tidak mampu memenuhi kebutuhan bahkan menikmati kebebasan, maka hal tersebut dapat mengarah pada kondisi kemiskinan. Eksploitasi ini menempatkan pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tidak bisa menikmati kebebasan. Teori ini menggambarkan masalah ekspoilitasi dan ekslusi saling terkait dan saling memperkuat dalam menyebabkan kemiskinan dikalangan pekerja. Eksploitasi dilakukan oleh mereka yang memiliki alat-alat produksi, sementara para pekerja adalah pusat produksi, dan menerima keuntungan yang berasal dari akumulasi surplus produksi dengan jumlah yang sangat sedikit atau bahkan sama sekali. Oleh karena itu, teori ini mengakumulasi lebih banyak kekayaan dan surplus melalui eksploitasi terhadap pekerja (Dube, 2019).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa salah satu kebijakan yang efektif untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pemberian bantuan langsung kepada penduduk miskin oleh pemerintah. Pemberian bantuan langsung tersebut dapat berupa bantuan tunai, subsidi, atau pembangunan fasilitas layanan publik. Hal tersebut dilakukan agar penduduk miskin mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dan keluar dari jebakan kemiskinan. Dengan pemberian bantuan biaya pendidikan, kemudahan dalam akses pendidikan sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dan dapat terserap oleh pasar tenaga kerja.

Berdasarkan teori pembangunan yang diungkapkan oleh Rostow dan Musgrave kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sesuai teori Rostow dan Musgrave model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadi perkembangan ekonomi, di mana pengeluaran pemerintah memiliki persentase yang besar sebagai penyedia fasilitas, tahap menengah terjadi pembangunan ekonomi di mana pengeluaran pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan tahap lanjut terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan kemiskinan (Sari & Nurdin, 2018).

Susanti & Sartiyah (2019) dengan menggunakan analisis regesi data panel, menemukan bahwa PDRB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, jumlah pengangguran dan pengeluaran sektor sosial, ditemukan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu Maret 2018 hingga

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

Maret 2019, masing masing dengan koefisien regresi sebesar -0,804, -0,362, 1.015, dan -0,513, serta signifikan empirik (ρ) t sebesar 0,010 (< 0,05), 0,000 (<0,01), 0,022 (< 0,05), dan 0,067 (< 0,10). Pola hubungan yang digunakan pada keempat variabel tersebut dengan jumlah penduduk miskin adalah linier-linier.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Palenewen et al,(2018) mengungkapkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak-anak di keluarga miskin diharapkan anak-anak memiliki kesehatan, keterampilan dan produktivitas yang baik, pada akhirnya dapat terserap di pasar tenaga kerja, sehingga memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan faktor yang dapat menghasilkan dan peningkatan produktivitas yang baik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, memiliki kemampuan bersaing dalam pasar tenaga kerja, sehingga output barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat, pendapatan juga meningkat. Akhirnya tercipta aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan (Pratama et al., 2019).

Selama kurun waktu 2012-2016, di Provinsi Kalimantan Selatan, ditemukan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,005 serta signifikansi empirik (ρ) t bernilai 0,0049 (< 0,01). Pola hubungan yang digunakan untuk merelasikan variabel tersebut dengan tingkat kemiskinan adalah linier-linier. Sementara itu, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ditemukan tidak berpengaruh signifikan dengan signifikansi empirik (ρ) t bernilai lebih dari 0,127 (> 0,10) (Kinanti, 2018).

Upah Minimum Regional

Meningkatnya upah yang diterima oleh pekerja memiliki dampak meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi, membantu masyarakat keluar dari lingkar kemiskinan. Upah minimum dapat menjadi salah satu cara mengurangi kemiskinan. Apabila kenaikan upah terjadi secara terus menerus maka akan meningkatkan PDRB perkapita menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa menciptakan perekonomian yang baik. Ketika perekonomian daerah baik maka angka kemiskinan menurun (Kurniawati et al., 2017).

Di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2002-2016, Sari dan Mangkuwinata (2017) menemukan bahwa upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar 0.259 dan 0.283 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0.037 (< 0,05). Pola hubungan yang digunakan pada variabel tersebut dengan tingkat kemiskinan adalah linier-linier. Sementara itu, inflasi dan pengangguran ditemukan tidak berpengaruh signifikan, dengan signifikan empirik (ρ) t masing- masing sebesar 0.373 (> 0,10) dan 0.919 (> 0,10).

Indeks Gini

Tujuan utama kebijakan pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

menurunkan jumlah penduduk miskin, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional sehingga upaya penurunan jumlah penduduk miskin harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu (Todaro & Smith, 2015).

Distribusi pendapatan atau kesenjangan, dan tingkat kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan, semakin tinggi kesenjangan maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi. Kemiskinan yang kuat yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan mengakibatkan adanya pengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Rozali, 2020).

Nina & Rustariyani (2018) dengan analisis regresi linear berganda, menemukan bahwa indeks gini, dan pengeluaran non makanan per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Masing-masing dengan koefisien regresi sebesar 0,198, 0,455 dan signifikansi empirik (ρ) t masing- masing bernilai 0,006 (< 0,01) dan 0,031 (< 0,05). Pola hubungan yang digunakan untuk merelasikan kedua variabel dengan tingkat kemiskinan adalah linier-linier. Sementara itu, belanja modal ditemukan tidak berpengaruh signifikan dengan signifikansi empirik (ρ) t bernilai 0,383 (> 0,05).

Loyce & Muturi (2019) dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan model koreksi kesalahan atau *Error Correction Model (ECM)*, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di negara Kenya selama kurun waktu 1964-2010, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar 0.270, 1,451 dan -0.429. serta signifikan empirik (ρ) t sebesar 0.001 (< 0.01), 0,000 (< 0.01) dan 0.000 (< 0.01). Pola hubungan yang digunakan pada ketiga variabel tersebut dengan jumlah penduduk miskian adalah linier-logaritma. Sementara itu, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan, dengan signifikansi empirik (p) t sebesar 0,405 (> 1,10).

Isnaini et al. (2020), dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, menemukan bahwa pendidikan, upah minimum regional, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2002- 2017. Masing–masing dengan koefisien regresi sebesar -0,755, -0,000 dan -5,208 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,030 (< 0,05), 0,018 (< 0,05) dan 0,033 (< 0,05). Pola hubungan yang digunakan pada ketiga variabel tersebut terhadap dengan investasi adalah linier-linier. Sementara itu, jumlah penduduk dan inflasi ditemukan tidak berpengaruh signifikan dengan signifikan empirik (ρ) t masing- masing sebesar 0,143 (> 0,10) dan 0,634 (> 0,10).

Selama kurun waktu 2012-2014, di Provinsi Jawa Timur, ditemukan pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan tingkat pengangguran berpengaruh siginfikan terhadap tingkat kemiskinan, masing-masing dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0,001, -0,002 dan 0,347 serta sigifikansi empirik (ρ) t bernilai 0,000 (< 0,01), 0,020 (< 0,05) dan 0,000 (< 0,01). Pola hubungan yang digunakan untuk merelasikan ketiga variabel tersebut dengan tingkat kemiskinan adalah linier-linier (Marinda et al, 2017).

Dengan menggunakan regresi data panel di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2012-2016, Adhilla & Herianingrum (2020) menemukan pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, masing-masing dengan koefisien regresi -0,000 dan -0,000 serta signifikan empirik (ρ) t sebesar 0,001 (<

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

0,05) dan 0,000 (< 0,05). Pola hubungan yang digunakan kedua variabel dengan tingkat kemiskinan adalah linier-linier.

Di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018, Muhammad et al. (2019), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,251 dan -0,099 serta signifikansi empirik (ρ) t masing-masing sebesar 0,018 (< 0,05) dan 0,005 (< 0,01). Pola hubungan yang digunakan logaritma-linier. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi empirik (ρ) t masing- masing sebesar 0,950 (> 0,10) dan 0,683 (> 0,01).

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini adalah melalui studi kepustakaan. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk melengkapi hasil olahan data sekunder, informasi-informasi yang berkaitan juga dikumpulkan melalui berbagai literatur serta surat kabar dan artikel yang diunduh melalui media internet. Data sekuder ini berbentuk data runtun waktu *(time series)* dan *Cross section*. Data *time series* merupakan data-data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan kurutan waktu, seperti dalam jam, hari, minggu, bulan, kuartal dan tahun. Data time series diambil dari tahun 2013-2021. Sedangkan data *Cross section* menggunakan 6 provinsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel selama kurun waktu 2013- 2021 di 6 provinsi di Indonesia, dengan model ekonometrika sebagai berikut :

$$PPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log(IG)_{it} + \beta_2 \log(PP)_{it} + \beta_3 \log(PK)_{it} + \beta_4 \log(UMR)_{it} + s_{it}$$

di mana :

PPM	= Presentase Peduduk Miskin
IG	= Indeks Gini
PP	= Pengelaran Pemerintah Sektor Pendidikan
PK	= Pengelaran Pemerintah Sektor Kesehatan
UMR	= Upah Minimum Regional
	= Konstanta
…..	= Koefisien
	= Variabel Penggangu
i	= Provinsi ke i
t	= tahun ke t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan agar dapat mengintepretasikan hasil regresi dengan benar. Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan *Pooled Ordinary Least Squares* (*PLS*), *Fixed Effect Model* (*FEM*) dan *Random Effect Model* (*REM*) dapat dilihat pada Tabel 2.

Uji Pemilihan Model Terestimasi

Uji Chow dan uji Hausman akan dipakai untuk memilih model terestimasi terbaik – *Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model* (*REM)*. Apabila ternyata pada Uji Chow terpilih *Pooled Least Square (PLS)* dan pada uji Hausman

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

terpilih *Random Effect Model* (*REM)*, maka harus dilakukan uji tambahan, yakni uji *Lagrange Multiplier (LM)* untuk memilih model terestimasi terbaik antara *Pooled Least Square (PLS)* dan *Random Effect Model* (*REM)*.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - *Cross section*

Variabel	**Koefisien Regresi**		
	PLS	**FEM**	**REM**
C	108,3528	44,04491	89,35041
LOG(IG)	-3,127255	10,39459	-3,024772
LOG(PP)	-0,621616	-0,778270	-0,533027
LOG(PK)	0,142250	2,256927	0,202240
LOG(UMR)	-6,816072	-2,342399	-5,558372
R^2	0,511036	0,774931	0,375645
Adjusted. R^2	0,471120	0,728895	0,324677
Statistik *F*	12,80295	16,83288	7,370251
Prob. Statistik *F*	0,000000	0,000000	0,000099
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section F(5,44) = 10,318112; Prob. F(5,44) = 0,0000			
(2) Hausman			
Cross-Section random χ^2 (4) = 26,752347; Prob. χ^2 = 0,0000			

Sumber: Olah data, 2022.

Uji Chow

Uji Chow dipakai untuk menentukan model terestimasi *PLS* atau *FEM*. H_0 uji Chow: model terestimasi adalah *Pooled Least Squares* (*PLS*), dan H_A-nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (*FEM*). H_0 diterima jika nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$; H_0 ditolak bila nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F \leq \alpha$. Hasil uji Chow dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* sebesar 0,0001 (< 0,01), jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *FEM.*

Uji Hausman

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi *FEM* atau *REM*. H_0 uji Hausman: model terestimasi adalah *Random Effect Model* (*REM*) dan H_A- nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (*FEM*). H_0 diterima jika nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 > \alpha$; dan H_0 ditolak bila nilai *p* (*p- value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 \leq \alpha$. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2, terlihat nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 sebesar 0,0000 (< 0,01), jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (*FEM*).

Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, model *Fixed Effect Model* (*FEM*) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *FEM* tersaji pada Tabel 3.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

Tabel 3. Model Estimasi *Fixed Effect Model (FEM)*

$$\widehat{PP_{7t}} = 44{,}04491 + \underset{(0{,}3564)}{10{,}39459 \log (IG)_{it}} - \underset{(0{,}0709)^{**}}{0{,}778270 \log (PP)_{it}} + \underset{(0{,}0090)^{*}}{2{,}256927 \log (PK)_{it}} - \underset{(0{,}1532)}{2{,}342399 \log (UMR)_{it}}$$

$R^2 = 0{,}774931$; $DW = 0{,}908404$; $F. = 16{,}83288$; Prob. $F = 0{,}000000$

Sumber: Lampiran 1. **Keterangan:** *Signifikan pada α = 0,01; ** Signifikan pada α = 0,05; *** Signifikan pada α = 0,10; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Uji Eksistensi Model Terestimasi FEM

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji *F*. Karena dalam model terestimasi terbaik *FEM* (*Fixed Effect Model*) terdapat 5 variabel independen, maka formulasi hipotesisnya adalah: $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (koefisien regresi keempat variabel nol atau model tidak eksis); H_A: $\beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0 \vee \beta_4 \neq 0 \vee \beta_5 \neq 0$ (setidaknya terdapat satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis). H_0 akan diterima jika nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F \leq \alpha$.

Dari Tabel 3, terlihat bahwa nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,0000 (< 0,01) ; jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi *FEM* eksis.

Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari Tabel 3 terlihat nilai R^2 pada model *Fixed Effect Model* (FEM) sebesar 0,774931 artinya 77,5% variasi variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel indeks gini, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan upah minimum regional. Sisanya, sebesar 22,5%, dipengaruhi oleh variabel- variabel atau faktor- faktor lain yang tidak dimasukan dalam model.

Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi FEM

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara individual atau parsial. Uji validitas pengaruh memakai uji *t*. H_0 uji t adalah , variabel independen ke i dalam model terestimasi tidak memiliki pengaruh signifikan; H_A-nya : variabel independen ke *i* dalam model terestimasi memiliki pengaruh signifikan. H_0 akan diterima jika nilai *p (p value)*, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai *p p(value)*, probabilitas, atau signifikan empirik statistik $t \leq \alpha$. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
LOG(IG)	0,3564	> 0,10	Tidak Signifikan
LOG(PP)	0,0709	< 0,10	Signifikan pada α = 0,10
LOG(PK)	0,0090	< 0,01	Signifikan pada α = 0,01
LOG(UMR)	0,1532	> 0,10	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran, diolah·

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

Pembahasan

Berdasarkan data dan juga analisis yang telah dilakukan, kemiskinan di Indonesia selama periode 2013-2021 ternyata dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara indeks gini dan upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan Indonesia.

Tidak adanya pengaruh Indeks Gini terhadap penduduk miskin di Pulau Jawa dikarenakan pendapatan masyarakat di Pulau Jawa cenderung merata, nilai ketimpangan pada Pulau Jawa diangka 0,3. Masyarakat di Pulau Jawa memiliki pekerjaan yang cenderung homogen di sektor pertanian dan perkebunan yang menyebabkan masyarakat di Pulau Jawa memiliki distribusi pendapatan yang hampir sama dan merata, Maka Indeks Gini kurang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Pulau Jawa. Nilai indeks Gini di Pulau Jawa mengalami stagnasi di angka 0,3 dan masih tergolong ketimpangan rendah, ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin disebabkan karena adanya ketimpangan kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta ketimpangan keahlian/keterampilan, tenaga kerja yang memiliki kualitas rendah akan mudah tersingkirkan oleh tenaga kerja yang memiliki kualitas lebih baik, ketimpangan keahlian disebabkan karena keahlian yang dimiliki penduduk lokal dengan pendatang berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cendanawangi et al.,(2020) bahwa indeks gini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 1987-2017. Putro et al., (2018) menemukan hal yang berbeda bahwa bahwa indeks gini berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Pendidikan mer upakan suatu kekuatan kemajuan pembangunan ekonomi, sebab pendidikan memiliki anggaran pemerintah paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, Namun memiliki waktu cukup lama dalam mencapai manfaat pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sepenuhnya belum terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan siswanya, tetapi lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat tidak langsung pada pendidikan, sehingga hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan yang berujung pada peningkatan kemiskinan. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia.

Muliza *et al*. (2017) menyatakan fokus prioritas pemerintah pada pembangunan fisik infrastruktur pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang, sehingga manfaat dari alokasi anggaran belum sepenuhnya dirasakan dan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Sebagai contoh, di provinsi Papua diketahui bahwa realisasi anggaran pendidikan berdasarkan APBD hanya sebesar 2,98% dari total anggaran, hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi dana pendidikan sebesar 20%. Maka provinsi tersebut dinilai tidak efisien, dalam melakukan realisasi anggaran, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, masih banyak masyarakat miskin di wilayah tersebut yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Penelitian ini serupa dengan Sunusi (2014) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara selama periode 201-2010. Aini (2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh pada penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama kurun waktu 2014-2018. Fithri & Kaluge (2017)

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

menemukan tidak ada pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan dengan kemiskinan.

Hasil penelitian menemukan bahwa Upah Minimum Regional tidak berpengaruh terhadap presentase penduduk miskin di Pulau Jawa. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dapat membantu para pekerja keluar dari lingkar kemiskinan, sehingga adanya penurunan pada jumlah penduduk miskin. Penetapan upah minimum regional merupakan peran dari perusahaan kepada para pekerja, sehingga hubungan antar perusahaan dan pekerja dapat dicapai yaitu kesejahteraan buruh dan perkembangan perusahaan.

Tidak ada pengaruh upah minimum regional terhadap kemiskinan disebabkan karena tidak adanya penetapan upah minimum regional yang menciptakan penghasilan yang layak. Kenaikan upah minimum regional setiap tahunnya menyesuaikan biaya hidup masing-masing wilayah. Biaya hidup yang tinggi disebabkan mahalnya harga barang pokok yang merupakan barang suplai dari luar daerah, kenaikan harga barang akan menurunkan tingkat daya beli masyarakat khususnya para penerima upah rendah. Untuk mengimbangi, perlu adanya peningkatan upah minimum regional yang diharapkan dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup minimal dan terhindar dari lingkar kemiskinan. Upah minimum regional semestinya murni sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun, kenaikan upah minimum sering diartikan sebagai kenaikan upah yang besar, terkesan upah minimum digunakan sebagai penentu upah, bukan sebagai pengaman sosial masyarakat berpendapatan rendah. Sehingga, harus ada upaya pemerintah dalam menegakkan aturan penetapan upah minimum yang telah berlaku pada perusahaan untuk melindungi penghasilan masyarakat yang rendah.

Utami & Siregar (2021) menemukan hasil yang sama bahwa upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara selama periode 2000-2016. Kurniawati *et al*. (2017) menemukan pengaruh negatif upah minimum regional terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia selama kurun waktu 2006- 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Artinya bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di pulau Jawa. Permasalahan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan masyarakat yang sehat dengan mengharapkan efek menetes ke bawah (*trickle down effect)*. Syarat untuk menurunkan kemiskinan yaitu perlu adanya industrialisasi pertanian dan distribusi pendapatan yang tepat, dan akumulasi modal manusia yang relatif cepat. Meningkatkan kemiskinan karena pengeluaran pemerintah sektor kesehatan disebabkan juga oleh pengalokasian dana yang kurang tepat sasaran. Selain itu juga disebabkan karena efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang kurang optimal berupa kurangnya alokasi anggaran dan anggaran tidak sesuai dengan prioritas. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sari & Nurdin (2018) menemukan bahwa "pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh". Fithri & Kaluge (2017) menemukan hasil yang berbeda bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10719

SIMPULAN

Mengacu pada tujuan penelitian dan jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam bab "pembahasan hasil" dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa selama periode 2013-2021 dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, sedangkan indeks gini dan upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Keterbatasan penelitian, bahwa penelitian belum dapat mendeskripsikan bagaimana memformulasikan sebuah model untuk mengurangi kemiskinan di Pulau Jawa.

Dengan melihat tidak berpengaruhnya upah minimum regional terhadap jumlah penduduk miskin, diharapkan pemerintah dapat menjadikan penetapan upah minimum regional sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun, kenaikan upah minimum sering diartikan sebagai kenaikan upah yang besar, sehingga terkesan upah minimum digunakan sebagai penentu upah, bukan sebagai cara pengaman sosial kaum berpendapatan rendah. Sehingga, harus ada upaya pemerintah dalam penegakan aturan penetapan upah minimum yang telah berlaku pada perusahaan untuk melindungi penghasilan masyarakat yang rendah.Untuk pemerintah yang dilakukan di masa yang akan datang realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan difokuskan kembali pada peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pendidik dan siswanya, bukan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan insfrastruktur yang memiliki manfaat tidak langsung pada pendidikan, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasikan tersebut, peneliti mengharapkan kepada penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang dapat menggunkan variabel- variabel lain yang lebih kompleks dan terukur dalam menjelaskan faktor-faktor kemiskinan, mengingat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih belum sepenuhnya mampu menjelaskan faktor-faktor kemiskinn di suatu daerah yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat analisis yang kompleks dan sistematis dalam menjelaskan faktor-faktor kemiskinan di suatu daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Adhilla, A. N & Herianingrum S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1002.

Aini, Riska. (2020). Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*, 1(1), 1-10.

Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.

Cendanawangi, E, Hariadi, S., & Arian, M. (2020). Pengaruh Remitansi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1987-2017. *CALYPTRA.* 8(2), 74-87.

Dube, E. (2019). Rarity or Reality of Some Theories of Poverty in Explaining The Poverty in Africa. *Journal Of Rural And Community Development*, 14(3), 48– 60.

Fithri, N & Kaluge, D. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* 15(2), 129-136.

Isnaini, F. N., Ahmad, A. A & Suharno. (2020). Determinan dan Trend Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 120.

Khoirudin, R & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. *Tirtayasa Ekonomika,* 15(1), 17-30.

Kinanti, R. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan,* 1(1), 249–259.

Kurniawati, A., Gunawan, B., & Indrasari, D. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 17(2), 233.

Loyce, O. V & Muturi, W. (2019). The Effect of Government Expenditure on Fiscal Deficits in Kenya. *The International Journal of Science & Technoledge*, 7(2), 219–242.

Muliza, Z. T & Chenny, S. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap Ipm di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69.

Muhammad, S. Z., Sapha, T., Fitriyani, D., & Jumadil, S. (2019). Investigating the public spending and economical growth on the poverty reduction in Indonesia. *Industrial Engineering and Management Systems*. 18(3), 495–500.

Nina, G. A & Rustariyuni, S. D. (2018). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *JIEP*, 18(2), 129–150.

Palenewen, T. O., Een, M., Walewangko & Sumujal, J, I. (2018). Kebudayaan di Sulawesi Utara. *Tim Peneliti Politeknik Negeri Manado*, 18(04), 52–61.

Pratama, Suda, N. R. K & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana,* 8(7), 651-680.

Putro, P. B. W., Mintarti, S & Wijaya, A. (2018). Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Inovasi,* 13(2), 121-126.

Rozali, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 11-12.

Saparuddin M. (2015). Develop an Empowerment Model for Poor Farmers in Jeneponto, South Sulawesi. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 4(2), 1689-1699.

Sari, J & Mangkuwinata, D. S. (2017). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 94–107.

Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007–2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128–136.

Sari, C. P. M & Nurdin, M.. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika Indonesia,* 7(1), 18-23.

Sunusi, D. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,* 14(2), 1-10.

Susanti, E. N & Sartiyah. (2019). Determinan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Dimensi*, *8*(2), 249–265.

Todaro, M. P & Smith, S. C. (2015). *Economic development 12th Edition.* United States of America*:* Pearson.

Utami, W & Siregar, T. (2021). Pengaruh UMR dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016. *Jurnal Pionir,* 7(1), 1-10.